

## 駐印尼代表處經濟組 函



受文者：經濟部國際貿易署

發文日期：中華民國113年8月8日

發文字號：印尼經字第1130000363號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文（印尼經1130000363\_Attach1.pdf、印尼經1130000363\_Attach2.pdf、印尼經1130000363\_Attach3.pdf）

主旨：有關印尼財政部頃公告對進口布料防衛措施落日複查案加徵關稅事，謹請鑒察並請轉知我相關業者及公協會因應。

說明：

- 一、依據印尼財政部本(113)年8月6日官網資料(如附件1)辦理。本組111年6月6日印尼經字第1110000219號及本年7月22日同字第1130000332號等函諒察。
- 二、依據印尼財政部長2024年第48號條例(如附件2)：
  - (一)將對進口布料課徵為期3年之防衛稅，涉案產品分為A至E等5類，稅率採從量稅：
    - 1、第1年印尼盾1,382至10,261/公尺或印尼盾8,285至25,655/公斤；
    - 2、第2年印尼盾1,333至9,899/公尺或印尼盾7,995至24,752/公斤；
    - 3、第3年印尼盾1,286至9,551/公尺或印尼盾7,710至



23,881/公斤。

(二)其中自我國進口之C類，即合成及人造纖維產品，得豁免加徵關稅，其餘4類產品則未列入豁免清單。

(三)加徵關稅措施將於公告日(即本年8月6日)起，3個工作天後(即本年8月9日)生效。

三、檢陳印尼財政部長2024年第48號條例英譯版如附件3，倘內容有差異，請以印尼文版本為主。

正本：經濟部國際貿易署

副本：



裝

訂

線



## Detail Peraturan

[Fulltext](#)[Evaluasi](#)

Meta	Keterangan
Kode	PMK 48 Tahun 2024
Judul	Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kain
Bentuk	Peraturan Menteri Keuangan
Nomor	48
Tahun	2024
Tajuk Entri Utama	Kementerian Keuangan
Unit Eselon I Pemrakarsa	Badan Kebijakan Fiskal
Tempat Penetapan	Jakarta
Tanggal Penetapan	23 Juli 2024
Tanggal Pengundangan	06 Agustus 2024
Tanggal Berlaku Efektif	09 Agustus 2024
Lokasi	-
Sumber	BN 2024 (453); 15 Halaman
Bahasa	Indonesia
Bidang Hukum	Hukum Keuangan Negara
Subyek	<a href="#">PENGENAAN BEA MASUK</a> <a href="#">BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN</a> <a href="#">IMPOR PRODUK KAIN</a>
Cluster	<a href="#">Bidang Bea Cukai</a>
Status	Berlaku
Keterangan Status/Riwayat	Baru
Jumlah Unduhan	5 Kali Unduh
Jumlah Tayang	1 Kali Tayang

[Kembali](#)



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 48 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN  
TERHADAP IMPOR PRODUK KAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan bea masuk dapat dikenakan tindakan pengamanan berupa pengenaan bea masuk tindakan pengamanan;
  - b. bahwa Menteri Keuangan telah menetapkan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk kain melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.010/2020 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kain sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.010/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.010/2020 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kain yang telah berakhir masa berlakunya;
  - c. bahwa hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia membuktikan industri dalam negeri masih mengalami kerugian serius akibat dari jumlah impor produk kain masih mengalami peningkatan dan industri dalam negeri masih membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan penyesuaian struktural, sehingga perlu dilakukan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap barang impor berupa produk kain;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kain;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KAIN.

Pasal 1

- (1) Barang impor berupa produk kain dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pos tarif, segmentasi produk kain, besaran tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan, dan jangka waktu pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 2

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan tambahan dari:

- a. bea masuk umum (*Most Favoured Nation*); atau
- b. bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional, yang telah dikenakan.

## Pasal 3

- (1) Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap importasi produk kain dari semua negara.
- (2) Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikecualikan terhadap importasi produk kain yang diproduksi dari negara tertentu.
- (3) Daftar negara yang dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan dan/atau dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk kain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta segmentasi produk kain yang dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan tercantum dalam lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 4

- (1) Importir wajib menyerahkan dokumen surat keterangan asal (*certificate of origin*) terhadap impor produk kain yang diproduksi dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Dalam hal importasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat keterangan asal (*certificate of origin*) preferensi, barang impor wajib memenuhi ketentuan asal barang berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.
- (3) Ketentuan asal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi:
  - a. kriteria asal barang (*origin criteria*);
  - b. kriteria pengiriman (*consignment criteria*); dan
  - c. ketentuan prosedural (*procedural provisions*).
- (4) Penelitian terhadap surat keterangan asal (*certificate of origin*) preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.
- (5) Dalam hal surat keterangan asal (*certificate of origin*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat keterangan asal (*certificate of origin*) non preferensi, penelitian surat keterangan asal (*certificate of origin*) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal importasi produk kain yang diproduksi dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, atas importasi tersebut dipungut Bea Masuk Tindakan Pengamanan.
- (2) Dalam hal surat keterangan asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sedang dilakukan permintaan *retroactive check*, atas importasi produk kain yang diproduksi dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipungut Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

Pasal 6

- (1) Besaran tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku terhadap barang impor produk kain yang:
  - a. dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan dengan pengajuan pemberitahuan pabean; atau
  - b. tarif dan nilai pabeannya ditetapkan oleh kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan tanpa pengajuan pemberitahuan pabean.
- (2) Pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juli 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



SRI MULYANI INDRAWATI



Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Agustus 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 453





LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 48 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN  
 TERHADAP IMPOR PRODUK KAIN

A. POS TARIF, BESARAN TARIF BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN, DAN JANGKA WAKTU PENGENAAN TINDAKAN PENGAMANAN

No	Pos Tarif	Besaran Tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan		
		Tahun pertama, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini	Tahun kedua, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal berakhirnya tahun pertama	Tahun ketiga, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal berakhirnya tahun kedua
A. Segmen Kain Tenunan dari Kapas				
1.	5208.12.00	Rp 1.657/meter	Rp 1.599/meter	Rp 1.542/meter
2.	5208.32.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
3.	5208.49.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
4.	5208.51.90	Rp 3.207/meter	Rp 3.094/meter	Rp 2.985/meter
5.	5208.52.90	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
6.	5209.12.00	Rp 3.315/meter	Rp 3.198/meter	Rp 3.086/meter
7.	5209.22.00	Rp 3.315/meter	Rp 3.198/meter	Rp 3.086/meter
8.	5209.29.00	Rp 3.315/meter	Rp 3.198/meter	Rp 3.086/meter
9.	5209.32.00	Rp 10.261/meter	Rp 9.899/meter	Rp 9.551/meter
10.	5209.39.00	Rp 10.261/meter	Rp 9.899/meter	Rp 9.551/meter
11.	5209.42.00	Rp 10.261/meter	Rp 9.899/meter	Rp 9.551/meter
12.	5209.51.90	Rp 10.261/meter	Rp 9.899/meter	Rp 9.551/meter
13.	5209.59.90	Rp 10.261/meter	Rp 9.899/meter	Rp 9.551/meter
14.	5210.29.00	Rp 1.842/meter	Rp 1.777/meter	Rp 1.714/meter
15.	5210.39.00	Rp 5.701/meter	Rp 5.500/meter	Rp 5.307/meter
16.	5210.41.90	Rp 5.701/meter	Rp 5.500/meter	Rp 5.307/meter
17.	5210.51.90	Rp 5.701/meter	Rp 5.500/meter	Rp 5.307/meter
18.	5211.11.00	Rp 3.315/meter	Rp 3.198/meter	Rp 3.086/meter
19.	5211.19.00	Rp 3.315/meter	Rp 3.198/meter	Rp 3.086/meter
20.	5211.20.00	Rp 3.315/meter	Rp 3.198/meter	Rp 3.086/meter
21.	5211.42.00	Rp 10.261/meter	Rp 9.899/meter	Rp 9.551/meter
22.	5211.43.00	Rp 10.261/meter	Rp 9.899/meter	Rp 9.551/meter
23.	5211.49.00	Rp 10.261/meter	Rp 9.899/meter	Rp 9.551/meter
24.	5212.11.00	Rp 1.657/meter	Rp 1.599/meter	Rp 1.542/meter

No	Pos Tarif	Besaran Tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan		
		Tahun pertama, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini	Tahun kedua, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal berakhirnya tahun pertama	Tahun ketiga, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal berakhirnya tahun kedua
25.	5212.24.00	Rp 10.261/meter	Rp 9.899/meter	Rp 9.551/meter
26.	5212.25.90	Rp 10.261/meter	Rp 9.899/meter	Rp 9.551/meter
<b>B. Segmen Kain Tenunan dari Benang Filamen Sintetik dan Artifisial</b>				
27.	ex5407.10.20 Kain tenunan untuk ban, selain tidak dikelantang; <i>conveyor duck</i> , selain tidak dikelantang	Rp 1.507/meter	Rp 1.454/meter	Rp 1.403/meter
28.	5407.10.91	Rp 1.507/meter	Rp 1.454/meter	Rp 1.403/meter
29.	5407.20.00	Rp 1.507/meter	Rp 1.454/meter	Rp 1.403/meter
30.	5407.30.00	Rp 1.507/meter	Rp 1.454/meter	Rp 1.403/meter
31.	5407.44.00	Rp 4.664/meter	Rp 4.500/meter	Rp 4.341/meter
32.	5407.51.00	Rp 1.382/meter	Rp 1.333/meter	Rp 1.286/meter
33.	5407.52.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
34.	5407.53.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
35.	5407.54.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
36.	5407.61.90	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
37.	5407.74.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
38.	5407.81.00	Rp 1.507/meter	Rp 1.454/meter	Rp 1.403/meter
39.	5407.82.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
40.	5407.83.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
41.	5407.84.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
42.	5407.91.00	Rp 1.507/meter	Rp 1.454/meter	Rp 1.403/meter
43.	5407.92.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
44.	5407.93.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
45.	5407.94.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
46.	5408.22.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
47.	5408.24.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
48.	5408.32.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
49.	5408.34.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
<b>C. Segmen Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial</b>				
50.	5512.29.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
51.	5513.11.00	Rp 1.382/meter	Rp 1.333/meter	Rp 1.286/meter
52.	5513.12.00	Rp 1.382/meter	Rp 1.333/meter	Rp 1.286/meter
53.	5513.21.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter

No	Pos Tarif	Besaran Tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan		
		Tahun pertama, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini	Tahun kedua, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal berakhirnya tahun pertama	Tahun ketiga, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal berakhirnya tahun kedua
54.	5513.23.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
55.	5513.39.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
56.	5513.49.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
57.	5514.12.00	Rp 1.657/meter	Rp 1.599/meter	Rp 1.542/meter
58.	5514.21.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
59.	5514.22.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
60.	5514.29.00	Rp 6.413/meter	Rp 6.187/meter	Rp 5.969/meter
61.	5514.42.00	Rp 6.413/meter	Rp 6.187/meter	Rp 5.969/meter
62.	5514.43.00	Rp 5.701/meter	Rp 5.500/meter	Rp 5.307/meter
63.	5514.49.00	Rp 5.701/meter	Rp 5.500/meter	Rp 5.307/meter
64.	5515.11.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
65.	5515.12.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
66.	5515.91.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
67.	5515.99.90	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
68.	5516.11.00	Rp 1.657/meter	Rp 1.599/meter	Rp 1.542/meter
69.	5516.13.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
70.	5516.14.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
71.	5516.22.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
72.	5516.24.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
73.	5516.92.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
D. Segmen Kain Tule dan Kain Jaring Lainnya; Renda; Kain Sulaman				
74.	5804.10.11	Rp 25.648/kg	Rp 24.745/kg	Rp 23.874/kg
75.	5804.10.19	Rp 25.648/kg	Rp 24.745/kg	Rp 23.874/kg
76.	5804.10.29	Rp 25.655/kg	Rp 24.752/kg	Rp 23.881/kg
77.	5804.10.99	Rp 25.655/kg	Rp 24.752/kg	Rp 23.881/kg
78.	5804.21.90	Rp 25.655/kg	Rp 24.752/kg	Rp 23.881/kg
79.	5804.29.10	Rp 25.654/kg	Rp 24.751/kg	Rp 23.880/kg
80.	5804.29.90	Rp 25.654/kg	Rp 24.751/kg	Rp 23.880/kg
81.	5804.30.00	Rp 25.654/kg	Rp 24.751/kg	Rp 23.880/kg
82.	5810.92.00	Rp 6.414/meter	Rp 6.188/meter	Rp 5.970/meter
E. Segmen Kain Rajutan atau Kaitan				
83.	6001.21.00	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg
84.	6001.92.20	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg
85.	6001.92.90	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg
86.	6004.10.90	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg

No	Pos Tarif	Besaran Tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan		
		Tahun pertama, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini	Tahun kedua, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal berakhirnya tahun pertama	Tahun ketiga, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal berakhirnya tahun kedua
87.	6004.90.00	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg
88.	6005.21.00	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg
89.	6005.36.90	Rp 8.285/kg	Rp 7.995/kg	Rp 7.710/kg
90.	6005.37.90	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg
91.	6005.90.90	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg
92.	6006.10.00	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg
93.	6006.21.00	Rp 8.285/kg	Rp 7.995/kg	Rp 7.710/kg
94.	6006.22.00	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg
95.	6006.23.00	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg
96.	6006.24.00	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg
97.	6006.31.90	Rp 8.285/kg	Rp 7.995/kg	Rp 7.710/kg
98.	6006.32.10	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg
99.	6006.32.20	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg
100.	6006.32.90	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg
101.	6006.33.10	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg
102.	6006.34.10	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg
103.	6006.42.10	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg
104.	6006.42.90	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg
105.	6006.43.90	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg
106.	6006.44.10	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg
107.	6006.44.90	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  
TENTANG  
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN  
TERHADAP IMPOR PRODUK KAIN

B. DAFTAR NEGARA DAN SEGMENTASI PRODUK KAIN YANG DIKENAKAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN DAN/ATAU YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN

No	Negara	Segmen Kain Tenunan dari Kapas	Segmen Kain Tenunan dari Benang Filamen Sintetik dan Artifisial	Segmen Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial	Segmen Kain Tule dan Kain Jaring Lainnya; Renda; Kain Sulaman	Segmen Kain Rajutan atau Kaitan
1.	Afghanistan	√	X	X	X	X
2.	Albania	√	X	X	X	X
3.	Angola	√	X	X	X	X
4.	Antigua and Barbuda	√	X	X	X	X
5.	Argentina	√	X	X	X	X
6.	Armenia	√	X	X	X	X
7.	Bahrain, Kingdom of	√	X	X	X	X
8.	Bangladesh	√	X	X	X	X
9.	Barbados	√	X	X	X	X
10.	Belize	√	X	X	X	X
11.	Benin	√	X	X	X	X
12.	Bolivia, Plurinational State of	√	X	X	X	X
13.	Botswana	√	X	X	X	X
14.	Brazil	√	X	X	X	X
15.	Brunei Darussalam	√	X	X	X	X

No	Negara	Segmen Kain Tenunan dari Kapas	Segmen Kain Tenunan dari Benang Filamen Sintetik dan Artifisial	Segmen Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial	Segmen Kain Tule dan Kain Jaring Lainnya; Renda; Kain Sulaman	Segmen Kain Rajutan atau Kaitan
16.	Burkina Faso	√	X	X	X	X
17.	Burundi	√	X	X	X	X
18.	Cabo Verde	√	X	X	X	X
19.	Cambodia	√	X	X	X	X
20.	Cameroon	√	X	X	X	X
21.	Central African Republic	√	X	X	X	X
22.	Chad	√	X	X	X	X
23.	Chile	√	X	X	X	X
24.	China	√	√	√	√	√
25.	Colombia	√	X	X	X	X
26.	Congo	√	X	X	X	X
27.	Costa Rica	√	X	X	X	X
28.	Côte d'Ivoire	√	X	X	X	X
29.	Cuba	√	X	X	X	X
30.	Democratic Republic of the Congo	√	X	X	X	X
31.	Djibouti	√	X	X	X	X
32.	Dominica	√	X	X	X	X
33.	Dominican Republic	√	X	X	X	X
34.	Ecuador	√	X	X	X	X
35.	Egypt	√	X	X	X	X
36.	El Salvador	√	X	X	X	X
37.	Eswatini	√	X	X	X	X
38.	Fiji	√	X	X	X	X
39.	Gabon	√	X	X	X	X

No	Negara	Segmen Kain Tenunan dari Kapas	Segmen Kain Tenunan dari Benang Filamen Sintetik dan Artifisial	Segmen Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial	Segmen Kain Tule dan Kain Jaring Lainnya; Renda; Kain Sulaman	Segmen Kain Rajutan atau Kaitan
40.	Gambia	√	X	X	X	X
41.	Georgia	√	X	X	X	X
42.	Ghana	√	X	X	X	X
43.	Grenada	√	X	X	X	X
44.	Guatemala	√	X	X	X	X
45.	Guinea	√	X	X	X	X
46.	Guinea-Bissau	√	X	X	X	X
47.	Guyana	√	X	X	X	X
48.	Haiti	√	X	X	X	X
49.	Honduras	√	X	X	X	X
50.	Hong Kong, China	√	√	√	√	√
51.	India	√	X	√	X	X
52.	Israel	√	X	X	X	X
53.	Jamaica	√	X	X	X	X
54.	Jordan	√	X	X	X	X
55.	Kazakhstan	√	X	X	X	X
56.	Kenya	√	X	X	X	X
57.	Korea, Republic of	√	√	√	√	√
58.	Kuwait, the State of	√	X	X	X	X
59.	Kyrgyz Republic	√	X	X	X	X
60.	Lao People's Democratic Republic	√	X	X	X	X
61.	Lesotho	√	X	X	X	X
62.	Liberia	√	X	X	X	X
63.	Macao, China	√	X	X	X	X

No	Negara	Segmen Kain Tenunan dari Kapas	Segmen Kain Tenunan dari Benang Filamen Sintetik dan Artifisial	Segmen Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial	Segmen Kain Tule dan Kain Jaring Lainnya; Renda; Kain Sulaman	Segmen Kain Rajutan atau Kaitan
64.	Madagascar	√	X	X	X	X
65.	Malawi	√	X	X	X	X
66.	Malaysia	√	√	√	√	X
67.	Maldives	√	X	X	X	X
68.	Mali	√	X	X	X	X
69.	Mauritania	√	X	X	X	X
70.	Mauritius	√	X	X	X	X
71.	Mexico	√	X	X	X	X
72.	Moldova, Republic of	√	X	X	X	X
73.	Mongolia	√	X	X	X	X
74.	Montenegro	√	X	X	X	X
75.	Morocco	√	X	X	X	X
76.	Mozambique	√	X	X	X	X
77.	Myanmar	√	X	X	X	X
78.	Namibia	√	X	X	X	X
79.	Nepal	√	X	X	X	X
80.	Nicaragua	√	X	X	X	X
81.	Niger	√	X	X	X	X
82.	Nigeria	√	X	X	X	X
83.	North Macedonia	√	X	X	X	X
84.	Oman	√	X	X	X	X
85.	Pakistan	√	X	X	X	X
86.	Panama	√	X	X	X	X
87.	Papua New Guinea	√	X	X	X	X



No	Negara	Segmen Kain Tenunan dari Kapas	Segmen Kain Tenunan dari Benang Filamen Sintetik dan Artifisial	Segmen Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial	Segmen Kain Tule dan Kain Jaring Lainnya; Renda; Kain Sulaman	Segmen Kain Rajutan atau Kaitan
88.	Paraguay	√	X	X	X	X
89.	Peru	√	X	X	X	X
90.	Philippines	√	X	X	X	X
91.	Qatar	√	X	X	X	X
92.	Russian Federation	√	X	X	X	X
93.	Rwanda	√	X	X	X	X
94.	Saint Kitts and Nevis	√	X	X	X	X
95.	Saint Lucia	√	X	X	X	X
96.	Saint Vincent and the Grenadines	√	X	X	X	X
97.	Samoa	√	X	X	X	X
98.	Saudi Arabia, Kingdom of	√	X	X	X	X
99.	Senegal	√	X	X	X	X
100.	Seychelles	√	X	X	X	X
101.	Sierra Leone	√	X	X	X	X
102.	Singapore	√	X	X	X	X
103.	Solomon Islands	√	X	X	X	X
104.	South Africa	√	X	X	X	X
105.	Sri Lanka	√	X	X	X	X
106.	Suriname	√	X	X	X	X
107.	Chinese Taipei	√	√	X	√	√
108.	Tajikistan	√	X	X	X	X
109.	Tanzania	√	X	X	X	X
110.	Thailand	√	X	X	X	X
111.	Togo	√	X	X	X	X

No	Negara	Segmen Kain Tenunan dari Kapas	Segmen Kain Tenunan dari Benang Filamen Sintetik dan Artifisial	Segmen Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial	Segmen Kain Tule dan Kain Jaring Lainnya; Renda; Kain Sulaman	Segmen Kain Rajutan atau Kaitan
112.	Tonga	√	X	X	X	X
113.	Trinidad and Tobago	√	X	X	X	X
114.	Tunisia	√	X	X	X	X
115.	Türkiye	√	X	X	X	X
116.	Uganda	√	X	X	X	X
117.	United Arab Emirates	√	X	X	X	X
118.	Uruguay	√	X	X	X	X
119.	Vanuatu	√	X	X	X	X
120.	Venezuela, Bolivarian Republic of	√	X	X	X	X
121.	Viet Nam	√	X	X	√	√
122.	Yemen	√	X	X	X	X
123.	Zambia	√	X	X	X	X
124.	Zimbabwe	√	X	X	X	X

Keterangan:

( √ ) = dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan

( X ) = tidak dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI



REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
NUMBER 48 OF 2024  
ABOUT  
IMPOSITION OF IMPORT DUTY SAFETY MEASURES  
CONCERNING THE IMPORT OF FABRIC PRODUCTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

- Considering: a. that based on the provisions of Article 70 of Government Regulation Number 34 of 2011 concerning Antidumping Measures, Compensatory Measures and Trade Security Measures, imported goods, in addition to being subject to import duties, may be subject to security measures in the form of imposition of security measure import duties;
- b. that the Minister of Finance has determined the imposition of security measures import duties on imports of fabric products through Minister of Finance Regulation Number 55/PMK.010/2020 concerning the Imposition of Safeguard Import Duties on Imports of Fabric Products as amended by Minister of Finance Regulation Number 78/PMK.010/ 2021 concerning Ministerial Amendments to Financial Regulation Number 55/PMK.010/2020 concerning the Imposition of Safeguard Import Duty on Imports of Fabric Products whose validity period has expired;
- c. that the results of the investigation by the Indonesian Trade Security Committee prove that the domestic industry is still experiencing serious losses as a result of the number of imports of fabric products still increasing and the domestic industry still needs additional time to complete structural adjustments, so it is necessary to impose import duties as security measures on imported goods in the form of products. cloth;

- d. that based on the considerations as intended in letters a, b and c, as well as to implement the provisions of Article 23D paragraph (2) of Law Number 17 of 2006 concerning Amendments to Law Number 10 of 1995 concerning Customs, it is necessary to stipulate a Ministerial Regulation Finance regarding Imposition of Safeguard Measures Import Duty on Imports of Fabric Products;

Bearing in mind: 1. Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;

2. Law Number 10 of 1995 concerning Customs (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1995 Number 75, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3612) as amended by Law Number 17 of 2006 concerning Amendments to Law Number 10 of 1995 concerning Customs (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2006 Number 93, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4661);
3. Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number 166, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4916);
4. Government Regulation Number 34 of 2011 concerning Antidumping Measures, Compensatory Measures and Trade Security Measures (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2011 Number 66, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5225);
5. Presidential Regulation Number 57 of 2020 concerning the Ministry of Finance (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2020 Number 98);
6. Minister of Finance Regulation Number 118/PMK.01/2021 concerning the Organization and Work Procedures of the Ministry of Finance (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2021 Number 1031) as amended several times, most recently by Minister of Finance Regulation Number 135 of 2023 concerning the Second Amendment to Ministerial Regulations Finance Number 118/PMK.01/2021 concerning the Organization and Work Procedures of the Ministry of Finance (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023 Number 977);

DECIDE:

To stipulate: REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE CONCERNING THE IMPOSITION OF IMPORT DUTY MEASURES OF SAFETY ON IMPORTS OF FABRIC PRODUCTS.

article 1

- (1) Imported goods in the form of fabric products are subject to Safeguard Import Duty for 3 (three) years.
- (2) Tariff headings, fabric product segmentation, the amount of the Safeguard Measures Import Duty tariff, and the period of imposition of the Safeguard Measures Import Duty as intended in paragraph (1) are listed in attachment letter A which is an inseparable part of this Ministerial Regulation.

Section 2

The imposition of Safeguard Measures Import Duty as intended in Article 1 is in addition to:

- a. general import duties (*Most Favored Nation*); or
- b. preferential import duties based on international treaties or agreements,

that has been worn.

Article 3

- (1) Safeguard Import Duty as intended in Article 1 is imposed on the import of fabric products from all countries.
- (2) Safeguard Import Duty as intended in Article 1 is excluded on the import of fabric products produced from certain countries.
- (3) The list of countries subject to Safeguard Import Duty and/or excluded from the imposition of Safeguard Import Duty on imports of fabric products as intended in paragraph (2) as well as the segmentation of fabric products subject to Safeguard Import Duty are listed in attachment letter B which is part inseparable from this Ministerial Regulation.

Article 4

- (1) Importers are required to submit certificate of origin documents *for* imports of fabric products produced from countries that are exempt from the imposition of Safeguard Measures Import Duty as intended in Article 3 paragraph (2).
- (2) In the case of imports as intended in paragraph (1) using a preferential certificate of origin , the imported goods are required to comply with the provisions on the origin of goods based on international treaties or agreements.
- (3) The provisions on the origin of goods as intended in paragraph (2) must fulfill:
  - a. goods origin criteria (*origin criteria*);
  - b. delivery criteria (*consignment criteria*); And
  - c. procedural provisions (*procedural provisions*).
- (4) Examination of the preferential certificate of origin as intended in paragraph (2), is carried out in accordance with the provisions of the laws and regulations governing the imposition of import duties on imported goods based on international treaties or agreements.
- (5) In the event that the certificate *of origin* as intended in paragraph (1) uses a non-preferential certificate of origin , research on the certificate of origin *is* carried out based on the provisions of the laws and regulations in the field of trading.

#### Article 5

- (1) In the event that the import of fabric products produced from a country which is exempt from the imposition of Safeguard Measures Import Duty as intended in Article 3 paragraph (2) does not meet the provisions as intended in Article 4, the Import Safeguards Import Duty is levied on the import.
- (2) In the event that a certificate of origin as intended in Article 4 paragraph (2) is being requested for a *retroactive check*, the import of fabric products produced from countries which are exempt from the imposition of Safeguard Measures Import Duty as intended in Article 3 paragraph (2) shall be subject to Customs Duty. Enter Security Precautions.

#### Article 6

- (1) The amount of the Safeguard Measures Import Duty tariff as intended in Article 1 applies to imported fabric products which:
  - a. the import customs notification document has received a registration number from the customs office where the customs obligation is settled, in the event that the settlement of the customs obligation is carried out by submitting a customs notification; or
  - b. The tariff and customs value are determined by the customs office where the customs obligation is settled, in the event that the customs obligation is settled without submitting a customs notification.
- (2) The entry and/or release of goods into and from free trade areas and free ports, bonded storage places, or special economic zones, is carried out in accordance with the provisions of the laws governing the entry and/or release of goods into and from trade areas, free and free ports, bonded storage areas, or special economic zones.

#### Article 7

This Ministerial Regulation comes into force after 3 (three) working days from the date of promulgation.

So that everyone is aware, this Ministerial Regulation is ordered to be promulgated by placing it in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

Stipulated in Jakarta on July 23  
2024



MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,



SRI MULYANI INDRAWATI

Promulgated in Jakarta on

PLT. DIRECTOR GENERAL OF LEGAL  
REGULATIONS MINISTRY OF LAW AND HUMAN  
RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

STATE NEWS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA YEAR 2024 NUMBER

ATTACHMENT  
REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
NUMBER 48 OF 2024  
ABOUT  
IMPOSITION OF IMPORT DUTY SAFETY MEASURES  
CONCERNING THE IMPORT OF FABRIC PRODUCTS

A. TARIFF POSTS, AMOUNT OF IMPORT DUTY RATES FOR SAFETY MEASURES, AND PERIOD FOR IMPOSITION OF SAFETY MEASURES

No	Tariff Post	Amount of Import Duty Tariff Security Measures		
		First year, with a period of 1 (one) year starting from the effective date  Regulation this Minister	Second year, with a period of 1 (one) year starting from the end date of the first year	Third year, with a period of 1 (one) year starting from the end date of the second year
A. Woven Fabric Segment from Cotton				
1.	5208.12.00 Rp. 1,657/meter	IDR 1,599/meter	IDR 1,542/meter	
2.	5208.32.00	IDR 5,131/meter	IDR 4,950/meter	IDR 4,776/meter
3.	5208.49.00 Rp. 5,131/meter	IDR 4,950/meter	IDR 4,776/meter	
4.	5208.51.90 Rp. 3,207/meter	IDR 3,094/meter	IDR 2,985/meter	
5.	5208.52.90 Rp. 5,131/meter	IDR 4,950/meter	IDR 4,776/meter	
6.	5209.12.00	IDR 3,315/meter	IDR 3,198/meter	IDR 3,086/meter
7.	5209.22.00 Rp. 3,315/meter	IDR 3,198/meter	IDR 3,086/meter	
8.	5209.29.00 Rp. 3,315/meter	IDR 3,198/meter	IDR 3,086/meter	
9.	5209.32.00 Rp. 10,261/meter Rp. 9,899/meter Rp. 9,551/meter			
10.	5209.39.00 Rp. 10,261/meter Rp. 9,899/meter Rp. 9,551/meter			
11.	5209.42.00 Rp. 10,261/meter Rp. 9,899/meter Rp. 9,551/meter			
12.	5209.51.90 Rp. 10,261/meter Rp. 9,899/meter Rp. 9,551/meter			
13.	5209.59.90 Rp. 10,261/meter Rp. 9,899/meter Rp. 9,551/meter			
14.	5210.29.00	IDR 1,842/meter	IDR 1,777/meter	IDR 1,714/meter
15.	5210.39.00 Rp. 5,701/meter	IDR 5,500/meter	IDR 5,307/meter	
16.	5210.41.90 Rp. 5,701/meter	IDR 5,500/meter	IDR 5,307/meter	
17.	5210.51.90 Rp. 5,701/meter	IDR 5,500/meter	IDR 5,307/meter	
18.	5211.11.00	IDR 3,315/meter	IDR 3,198/meter	IDR 3,086/meter
19.	5211.19.00 Rp. 3,315/meter	IDR 3,198/meter	IDR 3,086/meter	
20.	5211.20.00 Rp. 3,315/meter	IDR 3,198/meter	IDR 3,086/meter	
21.	5211.42.00 Rp. 10,261/meter Rp. 9,899/meter Rp. 9,551/meter			
22.	5211.43.00 Rp. 10,261/meter Rp. 9,899/meter Rp. 9,551/meter			
23.	5211.49.00 Rp. 10,261/meter Rp. 9,899/meter Rp. 9,551/meter			
24.	5212.11.00 Rp. 1,657/meter	IDR 1,599/meter	IDR 1,542/meter	



No	Tariff Post	Amount of Import Duty Tariff Security Measures		
		First year, with a period of 1 (one) year starting from the effective date  Regulation this Minister	Second year, with a period of 1 (one) year starting from the end date of the first year	Third year, with a period of 1 (one) year starting from the end date of the second year
25.	5212.24.00 Rp. 10,261/meter	Rp. 9,899/meter	Rp. 9,551/meter	
26.	5212.25.90 Rp. 10,261/meter	Rp. 9,899/meter	Rp. 9,551/meter	
<b>B. Woven Fabric Segments from Synthetic and Artificial Filament Yarns</b>				
27.	ex5407.10.20 Woven fabrics for tires, other than unbleached; conveyor duck, other than unbleached	IDR 1,507/meter	IDR 1,454/meter	IDR 1,403/meter
28.	5407.10.91 Rp. 1,507/meter		IDR 1,454/meter	IDR 1,403/meter
29.	5407.20.00	IDR 1,507/meter	IDR 1,454/meter	IDR 1,403/meter
30.	5407.30.00 Rp. 1,507/meter		IDR 1,454/meter	IDR 1,403/meter
31.	5407.44.00 Rp. 4,664/meter		IDR 4,500/meter	IDR 4,341/meter
32.	5407.51.00 Rp. 1,382/meter		IDR 1,333/meter	IDR 1,286/meter
33.	5407.52.00 Rp. 5,131/meter		IDR 4,950/meter	IDR 4,776/meter
34.	5407.53.00	IDR 5,131/meter	IDR 4,950/meter	IDR 4,776/meter
35.	5407.54.00 Rp. 5,131/meter		IDR 4,950/meter	IDR 4,776/meter
36.	5407.61.90 Rp. 5,131/meter		IDR 4,950/meter	IDR 4,776/meter
37.	5407.74.00 Rp. 5,131/meter		IDR 4,950/meter	IDR 4,776/meter
38.	5407.81.00	IDR 1,507/meter	IDR 1,454/meter	IDR 1,403/meter
39.	5407.82.00 Rp. 5,131/meter		IDR 4,950/meter	IDR 4,776/meter
40.	5407.83.00 Rp. 5,131/meter		IDR 4,950/meter	IDR 4,776/meter
41.	5407.84.00 Rp. 5,131/meter		IDR 4,950/meter	IDR 4,776/meter
42.	5407.91.00	IDR 1,507/meter	IDR 1,454/meter	IDR 1,403/meter
43.	5407.92.00 Rp. 5,131/meter		IDR 4,950/meter	IDR 4,776/meter
44.	5407.93.00 Rp. 5,131/meter		IDR 4,950/meter	IDR 4,776/meter
45.	5407.94.00 Rp. 5,131/meter		IDR 4,950/meter	IDR 4,776/meter
46.	5408.22.00	IDR 5,131/meter	IDR 4,950/meter	IDR 4,776/meter
47.	5408.24.00 Rp. 5,131/meter		IDR 4,950/meter	IDR 4,776/meter
48.	5408.32.00 Rp. 5,131/meter		IDR 4,950/meter	IDR 4,776/meter
49.	5408.34.00 Rp. 5,131/meter		IDR 4,950/meter	IDR 4,776/meter
<b>C. Woven Fabric Segments from Synthetic and Artificial Staple Fibers</b>				
50.	5512.29.00 Rp. 5,131/meter		IDR 4,950/meter	IDR 4,776/meter
51.	5513.11.00 Rp. 1,382/meter		IDR 1,333/meter	IDR 1,286/meter
52.	5513.12.00 Rp. 1,382/meter		IDR 1,333/meter	IDR 1,286/meter
53.	5513.21.00	IDR 5,131/meter	IDR 4,950/meter	IDR 4,776/meter

No	Tariff Post	Amount of Import Duty Tariff Security Measures		
		First year, with a period of 1 (one) year starting from the effective date  Regulation this Minister	Second year, with a period of 1 (one) year starting from the end date of the first year	Third year, with a period of 1 (one) year starting from the end date of the second year
54.	5513.23.00 Rp. 5,131/meter	IDR 4,950/meter	IDR 4,776/meter	
55.	5513.39.00 Rp. 5,131/meter	IDR 4,950/meter	IDR 4,776/meter	
56.	5513.49.00 Rp. 5,131/meter	IDR 4,950/meter	IDR 4,776/meter	
57.	5514.12.00 Rp. 1,657/meter	IDR 1,599/meter	IDR 1,542/meter	
58.	5514.21.00 Rp. 5,131/meter	IDR 4,950/meter	IDR 4,776/meter	
59.	5514.22.00 Rp. 5,131/meter	IDR 4,950/meter	IDR 4,776/meter	
60.	5514.29.00 Rp. 6,413/meter	IDR 6,187/meter	IDR 5,969/meter	
61.	5514.42.00 Rp. 6,413/meter	IDR 6,187/meter	IDR 5,969/meter	
62.	5514.43.00 Rp. 5,701/meter	IDR 5,500/meter	IDR 5,307/meter	
63.	5514.49.00 Rp. 5,701/meter	IDR 5,500/meter	IDR 5,307/meter	
64.	5515.11.00 Rp. 5,131/meter	IDR 4,950/meter	IDR 4,776/meter	
65.	5515.12.00 Rp. 5,131/meter	IDR 4,950/meter	IDR 4,776/meter	
66.	5515.91.00 Rp. 5,131/meter	IDR 4,950/meter	IDR 4,776/meter	
67.	5515.99.90 Rp. 5,131/meter	IDR 4,950/meter	IDR 4,776/meter	
68.	5516.11.00 Rp. 1,657/meter	IDR 1,599/meter	IDR 1,542/meter	
69.	5516.13.00 Rp. 5,131/meter	IDR 4,950/meter	IDR 4,776/meter	
70.	5516.14.00 Rp. 5,131/meter	IDR 4,950/meter	IDR 4,776/meter	
71.	5516.22.00 Rp. 5,131/meter	IDR 4,950/meter	IDR 4,776/meter	
72.	5516.24.00 Rp. 5,131/meter	IDR 4,950/meter	IDR 4,776/meter	
73.	5516.92.00 Rp. 5,131/meter	IDR 4,950/meter	IDR 4,776/meter	
D. Tulle and Other Net Fabric Segment; Lace; Embroidery Fabric				
74.	5804.10.11	IDR 25,648/kg	IDR 24,745/kg	IDR 23,874/kg
75.	5804.10.19	IDR 25,648/kg	IDR 24,745/kg	IDR 23,874/kg
76.	5804.10.29	IDR 25,655/kg	IDR 24,752/kg	IDR 23,881/kg
77.	5804.10.99	IDR 25,655/kg	IDR 24,752/kg	IDR 23,881/kg
78.	5804.21.90	IDR 25,655/kg	IDR 24,752/kg	IDR 23,881/kg
79.	5804.29.10	IDR 25,654/kg	IDR 24,751/kg	IDR 23,880/kg
80.	5804.29.90	IDR 25,654/kg	IDR 24,751/kg	IDR 23,880/kg
81.	5804.30.00	IDR 25,654/kg	IDR 24,751/kg	IDR 23,880/kg
82.	5810.92.00 Rp. 6,414/meter	IDR 6,188/meter	IDR 5,970/meter	
E. Knitted or Crocheted Fabric Segment				
83.	6001.21.00	IDR 25,655/kg	IDR 24,750/kg	IDR 23,880/kg
84.	6001.92.20	IDR 25,655/kg	IDR 24,750/kg	IDR 23,880/kg
85.	6001.92.90	IDR 25,655/kg	IDR 24,750/kg	IDR 23,880/kg
86.	6004.10.90	IDR 25,655/kg	IDR 24,750/kg	IDR 23,880/kg

No	Tariff Post	Amount of Import Duty Tariff Security Measures		
		First year, with a period of 1 (one) year starting from the effective date  Regulation this Minister	Second year, with a period of 1 (one) year starting from the end date of the first year	Third year, with a period of 1 (one) year starting from the end date of the second year
87.	6004.90.00	IDR 25,655/kg	IDR 24,750/kg	IDR 23,880/kg
88.	6005.21.00	IDR 25,655/kg	IDR 24,750/kg	IDR 23,880/kg
89.	6005.36.90	IDR 8,285/kg	IDR 7,995/kg	IDR 7,710/kg
90.	6005.37.90	IDR 25,655/kg	IDR 24,750/kg	IDR 23,880/kg
91.	6005.90.90	IDR 25,655/kg	IDR 24,750/kg	IDR 23,880/kg
92.	6006.10.00	IDR 25,655/kg	IDR 24,750/kg	IDR 23,880/kg
93.	6006.21.00	IDR 8,285/kg	IDR 7,995/kg	IDR 7,710/kg
94.	6006.22.00	IDR 25,655/kg	IDR 24,750/kg	IDR 23,880/kg
95.	6006.23.00	IDR 25,655/kg	IDR 24,750/kg	IDR 23,880/kg
96.	6006.24.00	IDR 25,655/kg	IDR 24,750/kg	IDR 23,880/kg
97.	6006.31.90	IDR 8,285/kg	IDR 7,995/kg	IDR 7,710/kg
98.	6006.32.10	IDR 25,655/kg	IDR 24,750/kg	IDR 23,880/kg
99.	6006.32.20	IDR 25,655/kg	IDR 24,750/kg	IDR 23,880/kg
100.	6006.32.90	IDR 25,655/kg	IDR 24,750/kg	IDR 23,880/kg
101.	6006.33.10	IDR 25,655/kg	IDR 24,750/kg	IDR 23,880/kg
102.	6006.34.10	IDR 25,655/kg	IDR 24,750/kg	IDR 23,880/kg
103.	6006.42.10	IDR 25,655/kg	IDR 24,750/kg	IDR 23,880/kg
104.	6006.42.90	IDR 25,655/kg	IDR 24,750/kg	IDR 23,880/kg
105.	6006.43.90	IDR 25,655/kg	IDR 24,750/kg	IDR 23,880/kg
106.	6006.44.10	IDR 25,655/kg	IDR 24,750/kg	IDR 23,880/kg
107.	6006.44.90	IDR 25,655/kg	IDR 24,750/kg	IDR 23,880/kg

ATTACHMENT  
REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
NUMBER  
ABOUT  
IMPOSITION OF IMPORT DUTY SAFETY MEASURES  
CONCERNING THE IMPORT OF FABRIC PRODUCTS

B. LIST OF COUNTRIES AND SEGMENTATION OF FABRIC PRODUCTS SUBJECT TO IMPORT DUTY MEASURES AND/OR WHICH  
EXCLUDED FROM IMPOSITION OF SAFETY MEASURES IMPORT DUTY

No	Country	Fabric Segment Woven from Cotton	Fabric Segment Woven from Filament Yarn Synthetic and Artificial	Fabric Segment Woven from Staple Fiber Synthetic and Artificial	Tulle and Net Cloth Segment Other; Lace; Embroidery Fabric	Fabric Segment Knitted or Connection
1.	Afghanistan	ÿ	X	X	X	X
2.	Albania	ÿ	X	X	X	X
3. Angola 4.		ÿ	X	X	X	X
	Antigua and Barbuda	ÿ	X	X	X	X
5.	Argentina	ÿ	X	X	X	X
6.	Armenia	ÿ	X	X	X	X
7.	Bahrain, Kingdom of	ÿ	X	X	X	X
8.	Bangladesh	ÿ	X	X	X	X
9.	Barbados	ÿ	X	X	X	X
10.	Belize	ÿ	X	X	X	X
11.	Benin	ÿ	X	X	X	X
12.	Bolivia, Plurinational State of	ÿ	X	X	X	X
13.	Botswana	ÿ	X	X	X	X
14.	Brazil	ÿ	X	X	X	X
15.	Brunei Darussalam	ÿ	X	X	X	X

No	Country	Fabric Segment Woven from Cotton	Fabric Segment Woven from Filament Yarn Synthetic and Artificial	Fabric Segment Woven from Staple Fiber Synthetic and Artificial	Tulle and Net Cloth Segment Other; Lace; Embroidery Fabric	Fabric Segment Knitted or Connection
16.	Burkina Faso	ÿ	X	X	X	X
17.	Burundi	ÿ	X	X	X	X
18.	Cabo Verde	ÿ	X	X	X	X
19.	Cambodia	ÿ	X	X	X	X
20.	Cameroon	ÿ	X	X	X	X
21.	Central African Republic	ÿ	X	X	X	X
22.	Chad	ÿ	X	X	X	X
23.	Chile	ÿ	X	X	X	X
24.	China	ÿ	ÿ	ÿ	ÿ	ÿ
25.	Colombia	ÿ	X	X	X	X
26.	Congo	ÿ	X	X	X	X
27.	Costa Rica	ÿ	X	X	X	X
28.	Côte d'Ivoire	ÿ	X	X	X	X
29.	Cuba	ÿ	X	X	X	X
30.	Democratic Republic of the Congo Djibouti	ÿ	X	X	X	X
31.		ÿ	X	X	X	X
32.	Dominica	ÿ	X	X	X	X
33.	Dominican Republic 34. Ecuador	ÿ	X	X	X	X
		ÿ	X	X	X	X
35.	Egypt El	ÿ	X	X	X	X
36.	Salvador	ÿ	X	X	X	X
37.	Eswatini	ÿ	X	X	X	X
38.	Fiji	ÿ	X	X	X	X
39.	Gabon	ÿ	X	X	X	X

No	Country	Fabric Segment Woven from Cotton	Fabric Segment Woven from Filament Yarn Synthetic and Artificial	Fabric Segment Woven from Staple Fiber Synthetic and Artificial	Tulle and Net Cloth Segment Other; Lace; Embroidery Fabric	Fabric Segment Knitted or Connection
40.	Gambia	ÿ	X	X	X	X
41.	Georgia	ÿ	X	X	X	X
42.	Ghana	ÿ	X	X	X	X
43.	Grenada	ÿ	X	X	X	X
44.	Guatemala	ÿ	X	X	X	X
45.	Guinea	ÿ	X	X	X	X
46.	Guinea-Bissau	ÿ	X	X	X	X
47.	Guiana	ÿ	X	X	X	X
48.	Haiti	ÿ	X	X	X	X
49.	Honduras	ÿ	X	X	X	X
50.	Hong Kong, China	ÿ	ÿ	ÿ	ÿ	ÿ
51.	India	ÿ	X	ÿ	X	X
52.	Israel	ÿ	X	X	X	X
53.	Jamaica	ÿ	X	X	X	X
54.	Jordan	ÿ	X	X	X	X
55.	Kazakhstan	ÿ	X	X	X	X
56.	Kenya	ÿ	X	X	X	X
57.	Korea, Republic of	ÿ	ÿ	ÿ	ÿ	ÿ
58.	the State of 59. Kyrgyz Republic	ÿ	X	X	X	X
60.	Lao People's Democratic Republic	ÿ	X	X	X	X
61.	Lesotho	ÿ	X	X	X	X
62.	Liberia	ÿ	X	X	X	X
63.	Macao, China	ÿ	X	X	X	X

No	Country	Fabric Segment Woven from Cotton	Fabric Segment Woven from Filament Yarn Synthetic and Artificial	Fabric Segment Woven from Staple Fiber Synthetic and Artificial	Tulle and Net Cloth Segment Other; Lace; Embroidery Fabric	Fabric Segment Knitted or Connection
64.	Madagascar	ÿ	X	X	X	X
65.	Malawi	ÿ	X	X	X	X
66.	Malaysia	ÿ	ÿ	ÿ	ÿ	X
67.	Maldives	ÿ	X	X	X	X
68.	Mali	ÿ	X	X	X	X
69.	Mauritania	ÿ	X	X	X	X
70.	Mauritius	ÿ	X	X	X	X
71.	Mexico	ÿ	X	X	X	X
72.	Moldova, Republic of	ÿ	X	X	X	X
73.	Mongolia 74.	ÿ	X	X	X	X
	Montenegro	ÿ	X	X	X	X
75.	Morocco	ÿ	X	X	X	X
76.	Mozambique 77.	ÿ	X	X	X	X
	Myanmar	ÿ	X	X	X	X
78.	Namibia	ÿ	X	X	X	X
79.	Nepal 80.	ÿ	X	X	X	X
	Nicaragua 81. Niger	ÿ	X	X	X	X
	Nigeria 83. North	ÿ	X	X	X	X
82.	Macedonia	ÿ	X	X	X	X
		ÿ	X	X	X	X
84.	Oman	ÿ	X	X	X	X
85.	Pakistan	ÿ	X	X	X	X
86.	Panama	ÿ	X	X	X	X
87.	Papua New Guinea	ÿ	X	X	X	X

No	Country	Fabric Segment Woven from Cotton	Fabric Segment Woven from Filament Yarn Synthetic and Artificial	Fabric Segment Woven from Staple Fiber Synthetic and Artificial	Tulle and Net Cloth Segment Other; Lace; Embroidery Fabric	Fabric Segment Knitted or Connection
88.	Paraguay	ÿ	X	X	X	X
89.	Peru	ÿ	X	X	X	X
90.	Philippines	ÿ	X	X	X	X
91.	Qatar	ÿ	X	X	X	X
92.	Russian Federation	ÿ	X	X	X	X
93.	Rwanda	ÿ	X	X	X	X
94.	Saint Kitts and Nevis	ÿ	X	X	X	X
95.	Saint Lucia	ÿ	X	X	X	X
96.	Saint Vincent and the Grenadines	ÿ	X	X	X	X
97.	Samoa	ÿ	X	X	X	X
98.	Saudi Arabia, Kingdom of 99.	ÿ	X	X	X	X
100.	Senegal	ÿ	X	X	X	X
101.	Seychelles	ÿ	X	X	X	X
102.	Sierra Leone	ÿ	X	X	X	X
103.	Singapore	ÿ	X	X	X	X
104.	Solomon Islands	ÿ	X	X	X	X
105.	South Africa	ÿ	X	X	X	X
106.	Sri Lanka	ÿ	X	X	X	X
107.	Suriname	ÿ	X	X	X	X
108.	Chinese Taipei	ÿ	ÿ	X	ÿ	ÿ
109.	Tajikistan	ÿ	X	X	X	X
110.	Tanzania	ÿ	X	X	X	X
111.	Thailand	ÿ	X	X	X	X
112.	Togo	ÿ	X	X	X	X



No	Country	Fabric Segment Woven from Cotton	Fabric Segment Woven from Filament Yarn Synthetic and Artificial	Fabric Segment Woven from Staple Fiber Synthetic and Artificial	Tulle and Net Cloth Segment Other; Lace; Embroidery Fabric	Fabric Segment Knitted or Connection
112.	Tonga	ÿ	X	X	X	X
113.	Trinidad and Tobago	ÿ	X	X	X	X
114.	Tunisia	ÿ	X	X	X	X
115.	Turkey	ÿ	X	X	X	X
116.	Uganda	ÿ	X	X	X	X
117.	United Arab Emirates	ÿ	X	X	X	X
118.	Uruguay	ÿ	X	X	X	X
119.	Vanuatu	ÿ	X	X	X	X
120.	Venezuela, Bolivarian Republic of	ÿ	X	X	X	X
121.	Vietnam	ÿ	X	X	ÿ	ÿ
122.	Yemen	ÿ	X	X	X	X
123.	Zambia	ÿ	X	X	X	X
124.	Zimbabwe	ÿ	X	X	X	X

Note: ( ÿ ) =

subject to Security Measures Import Duty

(X) = not subject to Safeguard Import Duty

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

signed

SRI MULYANI INDRAWATI